

**PROGRAM PENDIDIKAN SD-SMP SATU ATAP
DI PROVINSI BANTEN**

I. DASAR PEMIKIRAN

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 17, pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs). Program SD selama 6 tahun dan program SMP selama 3 tahun. Oleh sebab itu, program pendidikan dasar memakan waktu belajar selama 9 tahun. Selanjutnya, program wajib belajar di pendidikan dasar ini disebut *wajib belajar 9 tahun*.
- b. Program wajib belajar 9 tahun ini dicanangkan pada tahun 1994 dan ditargetkan bisa tuntas pada tahun 2003/2004 dengan tolok ukur APK SMP mencapai minimal 95 %. Namun pada tahun 1997 terjadi krisis multi dimensi, maka program tersebut dirancang tuntas pada tahun 2008/2009, bahkan sampai 2010.
- c. Program penuntasan wajib belajar 9 tahun tersebut dihadapkan pada suatu kendala tentang peningkatan APK. Hal ini terjadi karena adanya suatu lokasi yang belum mendapatkan pendidikan tingkat SMP, terutama di daerah terpencil, terisolasi, dan terpencar-pencar.
- d. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah mengupayakan pendirian SMP di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh lulusan SD setempat. Akan tetapi untuk pembangunan unit sekolah baru di daerah tersebut tidak efisien karena pada umumnya jumlah lulusan SD di daerah terpencil, terisolasi, dan terpencar-pencar ini menjadi kantong-kantong yang ber-APK rendah. Hal demikian itu terjadi karena tempat tersebut merupakan lokasi berkumpulnya anak-anak yang belum memperoleh layanan pendidikan SMP atau yang sederajat.
- e. Salah satu upaya yang dicanangkan pemerintah adalah mendekatkan SMP dengan tempat berkumpulnya anak-anak yang belum mendapatkan layanan

pendidikan SMP tersebut, tanpa membangun unit sekolah baru. Caranya adalah dengan mengembangkan program “Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap”. Program ini dimaksudkan untuk menyatukan SMP ke lokasi SD dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada di SD yang bersangkutan.

- f. Program SD-SMP Satu Atap ini perlu segera dilaksanakan. Hal ini bersandar pada keberadaan anak usia SD yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP sebanyak 542. 258 orang anak untuk tahun 2003/2004, dan 442.001 orang anak untuk tahun 2005.

II. PENGERTIAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SD-SMP SATU ATAP)

A. Pengertian

Pendidikan Dasar Terpadu pada dasarnya adalah penyenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu. Keterpaduan yang dimaksud dapat secara fisik dan atau secara pengelolaan. Keterpaduan secara fisik berarti bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD. Keterpaduan secara pengelolaan berarti:

- (1) Memiliki keterpaduan dalam pengembangan visi dan misi pendidikan dasar di lingkungannya.
- (2) Memiliki keterpaduan dalam penyusunan program kerja tahunan sekolah.
- (3) Memiliki keterpaduan dalam pengelolaan penerimaan siswa baru di lingkungannya.
- (4) Memiliki keterpaduan dalam usaha mengatasi angka putus sekolah, angka mengulang, dan angka transisi dengan pengembangan analisis kohor.
- (5) Memiliki keterpaduan dalam usaha mengatasi kebutuhan tenaga kependidikan.
- (6) Memiliki keterpaduan dalam mengatasi sarana penunjang proses belajar-mengajar.

- (7) Memiliki keterpaduan dalam pengembangan usaha peningkatan mutu pendidikan dasar.

B. Pola Pendidikan Dasar Terpadu

Pada tahap awal SD-SMP Satu Atap dikembangkan untuk menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka:

- (1) Pendidikan Dasar Terpadu (SD-SMP Satu Atap) dikembangkan di daerah terpencil, terisolasi, daerah yang siswanya terpecar-pecah karena kondisi geografis atau letak pemukiman yang terpecar.
- (2) SD-SMP dikembangkan pada SD yang lulusan tiap tahunnya relatif sedikit sehingga bila dibangun unit sekolah baru diperkirakan tidak efisien. Lulusan SD rata-rata tiap tahun tidak lebih dari 40 orang anak.
- (3) SD atau lingkungan sekitarnya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan fasilitas pendidikannya, antara lain untuk ruang belajar.
- (4) SMP terdekat tidak terjangkau oleh tamatan SD tersebut.
- (5) Minat dan peran serta masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi.
- (6) Pemda kab./kota bersedia untuk menambah tenaga kependidikan dengan memadai dan menyediakan biaya operasionalnya mulai tahun kedua pengoperasiannya.
- (7) Diutamakan daerah yang APK-nya masih rendah.

Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimulai tahun 2005 dengan Verifikasi SD untuk menentukan SD yang dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap pada tahun 2004. SD yang diverifikasi untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan diperoleh dari (1) peta SD terpencil yang dimiliki pusat, yaitu pada Direktorat TK/SD, dan (2) usulan bupati/walikota mengenai SD di daerahnya yang cocok dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap.

C. Model-model Pengembangan SD-SMP Satu Atap

Berdasarkan model pengembangannya, SD-SMP Satu Atap dapat dibedakan menjadi:

- (1) Sebuah SD dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dengan cara menambah sumber daya pendidikan.

Sebuah SD dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dengan cara menambah sumber daya pendidikan (misalnya guru, tenaga administrasi, ruang kelas, ruang perpustakaan dan laboratorium) sesuai yang dibutuhkan hingga memenuhi setidaknya persyaratan minimum. Apabila di sekitar SD-SMP Satu Atap terdapat SD-SD lainnya, secara administrative mereka bukan merupakan bagian dari SD-SMP Satu Atap tersebut, tetapi lulusannya dapat melanjutkan ke SD-SMP Satu Atap yang dimaksud.

- (2) Beberapa SD dalam satu daerah yang relatif berdekatan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap.

Beberapa SD dalam satu daerah yang relatif berdekatan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dengan cara menambahkan sumber daya (misalnya guru, tenaga administrasi, ruang kelas, ruang perpustakaan dan laboratorium) pada SD yang dianggap paling tepat (ditinjau dari aspek-aspek seperti letak, jumlah lulusan, dan kelengkapan sumber daya yang telah ada) hingga memenuhi setidaknya persyaratan minimum. SD-SD yang lain tetap dipertahankan (tidak ditiadakan atau di-*regrouping*).

- (3) Sebuah atau beberapa SD dan sebuah SMP yang sudah ada pada area jangkauan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap.

Sebuah atau beberapa SD dan sebuah SMP yang sudah ada pada area jangkauan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap. Pada model pengembangan ini pada dasarnya yang terjadi adalah pengembangan keterpaduan dalam pengelolaan dan taua pembinaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak dilakukan peniadaan atau *regrouping* SD-SD yang ada.

Untuk tahap awal, model pengembangan yang diterapkan adalah model pertama pada SD negeri.

D. Model-Model Pengelolaan SD-SMP Satu Atap

Ada sejumlah model pengelolaan yang dapat dipilih oleh kabupaten/kota dalam mengembangkan SD-SMP Satu Atap tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Pendidikan Dasar Terpadu dengan dua pengelola

- a. SD-SMP merupakan dua satuan pendidikan yang memiliki hubungan hirarkhis dalam system penerimaan siswa baru.
- b. Memiliki dua kepala sekolah, memiliki guru sebagai dewan guru yang berdiri sendiri/terpisah.
- c. Perpindahan dari kelas VI ke kelas VII tetap melalui PSB, tetapi lebih sederhana karena memiliki hubungan hirarkhis. Bahkan secara ekstrim dapat disebut sebagai mutasi mirip *kenaikan kelas*, namun harus lebih dahulu lulus ujian ahir SD sesuai ketentuan yang ada.
- d. Bila terdiri dari satu atau beberapa SD dan satu SMP, maka daya tampung SMP minimal sesuai dengan jumlah tamatan SD-nya.

Model tersebut dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut.

I	II	III	IV	V	VI	VII (I)	VIII (II)	IX (III)
SD						SMP		
PENDIDIKAN DASAR								

Pola ini sudah berjalan pada beberapa sekolah swasta yang memiliki kampus pendidikan sejak SD, SMP. Bahkan sampai SMA.

(2) Pendidikan Dasar Terpadu dengan satu pengelola

- a. Pada SD dan SMP model ini perpindahan dari kelas VI ke kelas VII (kelas I SMP) dilakukan dengan system SPB. Tetapi karena satu pengelola maka prosedurnya menjadi lebih sederhana.
- b. SD-SMP dikelola terpadu oleh satu pengelola.
- c. Guru sepanjang memungkinkan dapat mengajar di SD dan juga SMP.
- d. Bisa terdiri dari satu SD dan satu SMP baik sejak awal ataupun karena melalui proses *regrouping*.

Model tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

I	II	III	IV	V	VI	VII (I)	VIII (II)	IX (III)
SD						SMP		
PENDIDIKAN DASAR								

Pola satu atap dengan satu pengelola telah diterapkan pada SLB maupun Sekolah Indonesia di luar negeri.

SD-SMP Satu Atap dengan satu atau dua pengelola dirintis pengembangannya mulai tahun 2005 pada SD daerah terpencil, terisolasi, dan yang siswanya terpencar-pencar. Keputusan mengenai modep pengelolaan (apakah dengan satu atau dua pengelola) diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota dengan memperhatikan aspek efisien penyelenggaraan pendidikan dan kondisi daerah masing-masing (terutama kemampuan keuangan).

(3) Kelembagaan Pendidikan Dasar Terpadu

- a. Lembaga dari SD-SMP Satu Atap dengan **dua pengelola** tetap terdiri dari **dua lembaga**, yaitu SD dan SMP, dengan dua (2) kepala sekolah.
- b. Lembaga dari SD-SMP Satu Atap dengan **satu pengelola** tetap terdiri dari **dua lembaga**, yaitu SD dan SMP tetapi kepala sekolah hanya satu, sedang wakilnya dua yaitu wakil kepala yang menangani SD dan wakil kepala yang menangani SMP. Kelembagaan dan pengelolaan yang seperti ini sama dengan kelembagaan pada Sekolah Indonesia di luar negeri dan SLB.
- c. SD-SMP Satu Atap dengan **satu lembaga tidak dimungkinkan**, karena dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 dengan tegas dinyatakan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

III. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU

(SD-SMP SATU ATAP)

A. SD-SMP Satu Atap dengan Satu Pengelola

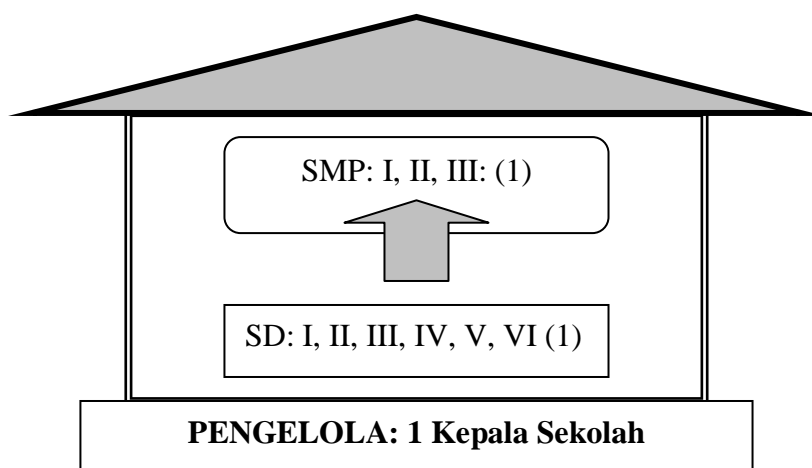
Pola ini cocok untuk diterapkan pada:

- (1) SD-SMP Satu Atap yang terletak di daerah yang sulit dijangkau/terpencil atau sulit transfortasinya.
- (2) Daerah yang sulit mendapatkan tenaga yang berkualitas.
- (3) Jumlah SD/MI dan SMP relatif sedikit, yaitu sekitar 200 siswa.

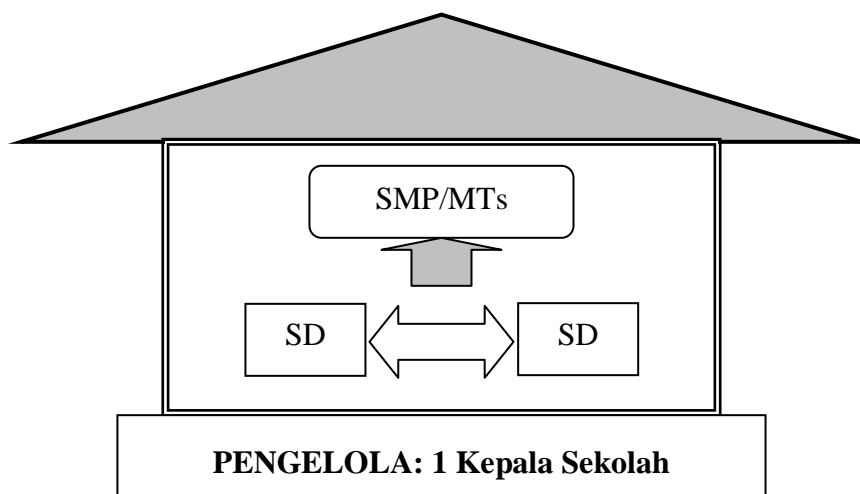
Dengan demikian seorang kepala sekolah SD sekaligus pengelola SMP.

Model pengelolaan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan-bagan sebagai berikut:

- a. Satu SD satu SMP, satu pengelola



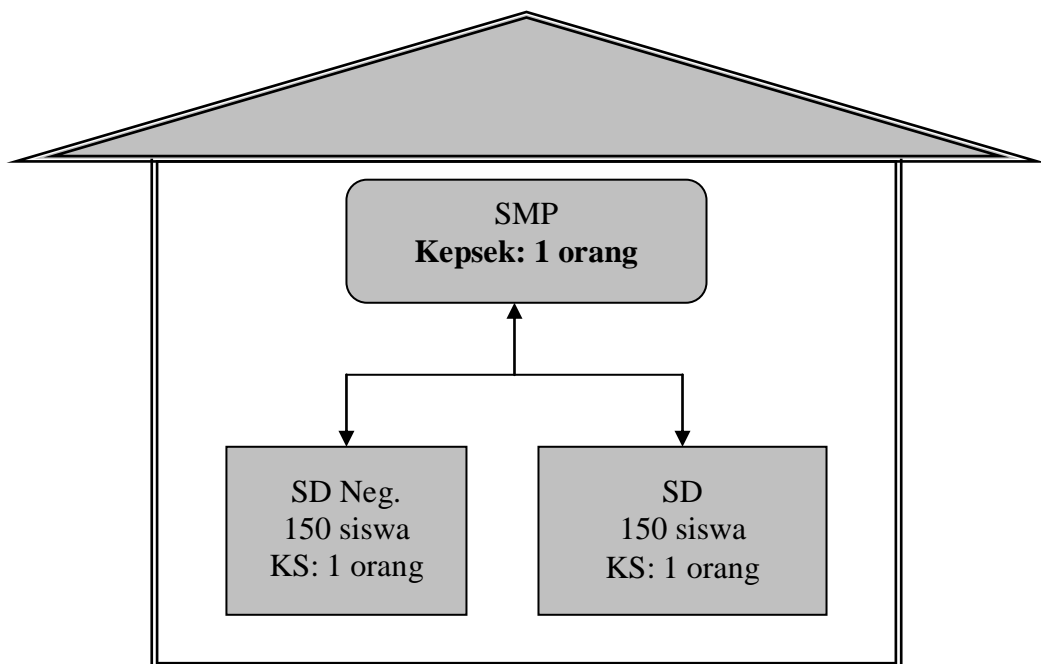
- b. Lebih dari satu SD dengan satu SMP



B. SD-SMP Satu Atap dengan dua pengelola atau lebih

1. Bila suatu SD-SMP Satu Atap terdiri dari satu SD yang menyatu/terpadu dengan satu SMP, SD-SMP Satu Atap tersebut dapat dikelola oleh 2 kepala sekolah (1 kepala SD dan 1 kepala SMP).
2. Bila suatu SD-SMP Satu Atap terdiri dari dua SD atau lebih dengan satu SMP, SD-SMP Satu Atap tersebut dapat dikelola oleh 3 kepala sekolah atau lebih (sejumlah kepala SD dan 1 kepala SMP) atau oleh 2 kepala sekolah (1 kepala sekolah SD dan 1 kepala sekolah SMP).

Contoh:



IV. PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP

A. Masa Perintisan

(1) Kriteria daerah perintis

- a. Proporsional untuk kabupaten/kota yang APK tingkat SMP-nya dan angka melanjutkan tamatan SD/MI masih rendah.
- b. Diutamakan sekolah SD yang tak terjangkau oleh pola-pola wajib belajar sederajat dengan SMP yang selama ini diterapkan.
- c. SD yang bersangkutan terletak di daerah terpencil, terisolasi atau siswanya terpencar-pencar.

- d. Lulusan SD relatif sedikit, maksimal 40 orang.
- e. Jarak SMP terdekat tidak terjangkau dari SD yang bersangkutan.
- f. Bila didirikan USB tidak efisien.

(2) Kebutuhan tenaga, sarana/prasarana, dan fasilitas pembelajaran.

Kebutuhan tenaga, sarana/prasarana, dan fasilitas dapat dilengkapi secara bertahap. Jenis dan sumber daya yang ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhan SD-SMP Satu Atap yang satu dengan lainnya dalam hal kebutuhan pemenuhan sumber daya. Pemerintah pusat menyediakan subsidi untuk pemenuhan sarana/prasarana pendidikan dan biaya operasional pada tahun pertama sedangkan pemerintah kabupaten/kota memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan (misalnya guru, laboran, pustakawan, dan tenaga administrative) dan biaya operasional sekolah mulai tahun kedua sejak dioperasikannya SD-SMP Satu Atap yang bersangkutan.

Cara menghitung kebutuhan tenaga kerja

- a. Tenaga guru mata pelajaran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rombongan belajar} \times \text{alokasi waktu/minggu}}{\text{Tugas wajib mengajar guru}}$$

Bila ada 3 kelas berarti kebutuhan guru adalah $(3 \times 36) : 24 = 5$ orang, dengan ketentuan bila jumlah jam pelajaran perkelas perminggu 36 jam dan tugas mengajar guru 24 jam pelajaran perminggu. Namun tiap SMP minimal harus guru B. Indonesia, B. Inggris, guru matematika, guru IPA, dan guru IPS.

- b. Kebutuhan guru BK dengan menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah siswa} : 150$$

- c. Kebutuhan tenaga TU, dengan menggunakan rumus:

$$(\text{Jumlah rombongan belajar} : 2) + 1$$

Namun berapapun jumlah rombongan belajar, kebutuhan untuk tenaga TU minimal ada 3 orang.

(3) Cara menghitung kebutuhan buku mata pelajaran

Cara menghitung kebutuhan buku mata pelajaran adalah dengan menggunakan rasio siswa : buku = 1 : 1 atau untuk setiap siswa mendapatkan satu buku untuk setiap jenis dan jilid buku. Selain itu perlu tersedia perpustakaan yang bisa menjadi sumber belajar baik untuk siswa, para guru, maupun untuk masyarakat.

(4) Kebutuhan alat IPA

Kebutuhan alat IPA lebih baik menggunakan kit alat IPA (4 kit), alat olahraga (1 set yang menyangkut atletik, permainan, dan senam), alat kesenian (1 set), dan alat keterampilan (1 set/unit).

(5) Kebutuhan ruang belajar

Kebutuhan ruang belajar sama dengan jumlah rombongan belajar, tetapi dapat dengan memanfaatkan ruang belajar SD/MI atau milik masyarakat, baik tanpa rehab maupun dengan rehab, dan bila perlu dengan menambah kekurangan ruang.

Bila SD-SMP Satu Atap ini jumlah siswanya relatif kecil, dapat diprediksi jumlah rombongan belajar untuk kelas I, II, III, sekitar 3 kelas, dengan jumlah siswa keseluruhan maksimal 120 siswa. Nilai hal ini terjadi maka sumber daya pendidikan dapat diprediksi sebagai berikut.

No.	Jenis Sumber Daya Pendidikan	Untuk	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala sekolah	SMP	1	
2.	Wakil KS	SMP	1	
3.	Guru mapel	SMP	5	
4.	Guru BP	120 siswa	1	
5.	TU dan pesuruh	3 rombel	3	
6.	Buku kurikulum SMP	KS, guru, perpustakaan	3 set	
7.	Buku teks utama	Siswa : 30 Guru Perpustakaan	50 set	Masing-masing mapel
8.	Buku sumber guru	Tiap guru 1 set @ 9 buku	10 set	Tiap sem. 3 buku = 3 x 3
9.	Alat lab. IPA	3 rombel	8 kit alat sederhana	
10.	Alat peraga IPS	3 rombel	1 set	
11.	Alat olahraga	3 rombel	1 set	
12.	Alat kesenian	3 rombel	1 set	

13.	Alat keterampilan	3 rombel	1 set	
14.	Meja kursi siswa	120 anak	120 set	
15.	Meja kursi guru	15 orang	15 set	
16.	Rehab ruang kelas	3 ruang	189 m ²	
17.	Ruang KS/WKS dan guru	2 ruang	24 m ²	
18.	tanah	Kantor dan ruang belajar serta penunjang	2000 m ²	

(6) Sasaran

Hingga tahun 2009 Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama menargetkan dikembangkannya 3500 SD-SMP Satu Atap. Untuk tahun 2005 dirintis pengembangan sejumlah 500 lokasi.

(7) Tahap kegiatan perintis

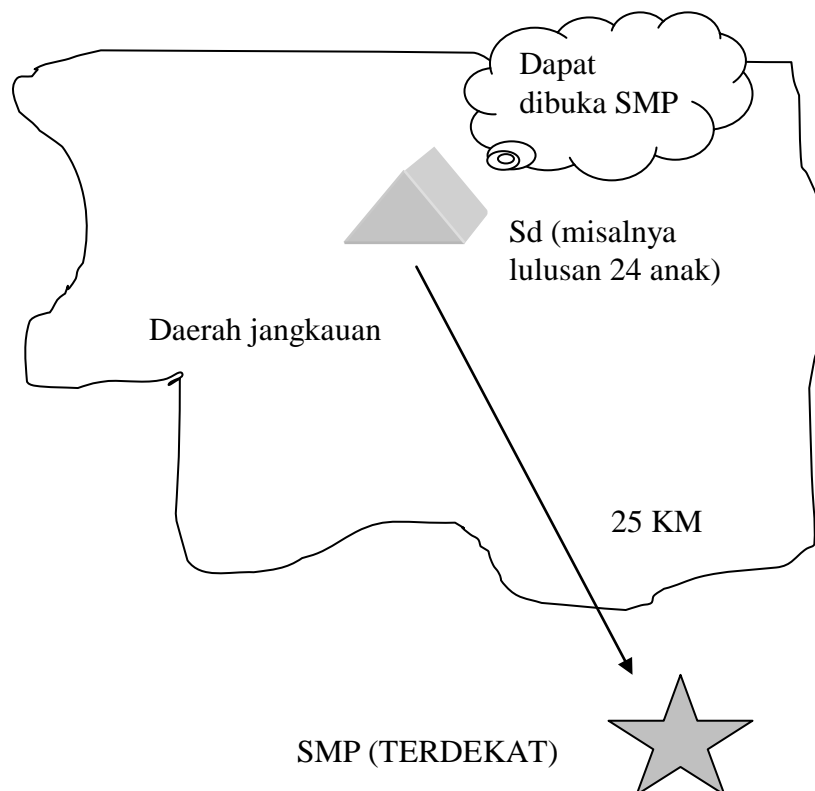
No.	Jenis Kegiatan	Sasaran	Penanggungjawab	waktu
1.	Penyusunan kerangka acuan	Kerangka acuan	Tim Dit PLP	Juli 2004
2.	Penyusunan Instrumen Studi Kelayakan	SD	Tim Dit PLP	Juli - Agustus
3.	Pendataan SD terpencil dan penerimaan usulan calon SD-SMP Satu Atap	SD terpencil	Tim Dit PLP	Oktober - Desember 2004
4.	Verifikasi calon SD-SMP Satu Atap dan analisis data	SD yang diusulkan	Tim Dit PLP	Oktober - Desember 2004
5.	Penetapan lokasi	500 lokasi	Dir. PLP	Januari 2005
6.	Penyusunan proposal pengembangan SD-SMP Satu Atap	SD yang telah ditetapkan sebagai calon SD-SMP Satu Atap	Komite Pengembangan SD-SMP Satu Atap	Februari 2005
7.	Rakor Unit Terkait	Penyiapan lokasi	Dir. PLP	Maret 2005
8.	Pengadaan sarana penunjang	Sekolah	Dir. PLP	2005
9.	Penyiapan tenaga	Kab./kota	Dinas Pend.	2005

	kependidikan		Kab./Kota	
10.	Diklat tenaga	KS, Guru, Dinas	Dir. PLP	2005
11.	Pelaksanaan perintisan	KS	Dinas Pend. Kab./Kota	2005
12.	Pemantauan dan evaluasi	Lokasi perintis	Tim Pusat dan Daerah	2005
13.	Analisis hasil	Sekolah perintis	Tim	2005
14.	Pemantapan/penyebaran	Lokasi baru	Tim	2006

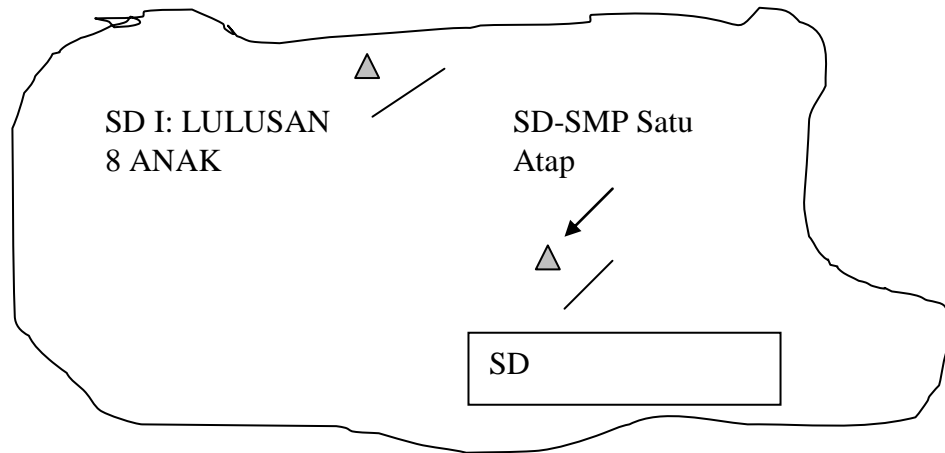
(8) Prioritas Lokasi

Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu dititikberatkan pada lokasi SD yang terletak di daerah terpencil, terisolasi, dan siswanya terpencar-pencar, lulusannya sedikit, dan SMP terdekat tidak terjangkau oleh siswa karena hambatan geografis dan transportasi. Berikut adalah contoh situasi/lokasi yang diprioritaskan pengembangannya.

- a. Sebuah SD dengan tamatan sedikit, sedangkan SMP/MTs yang ada, di luar daerah jangkauan.



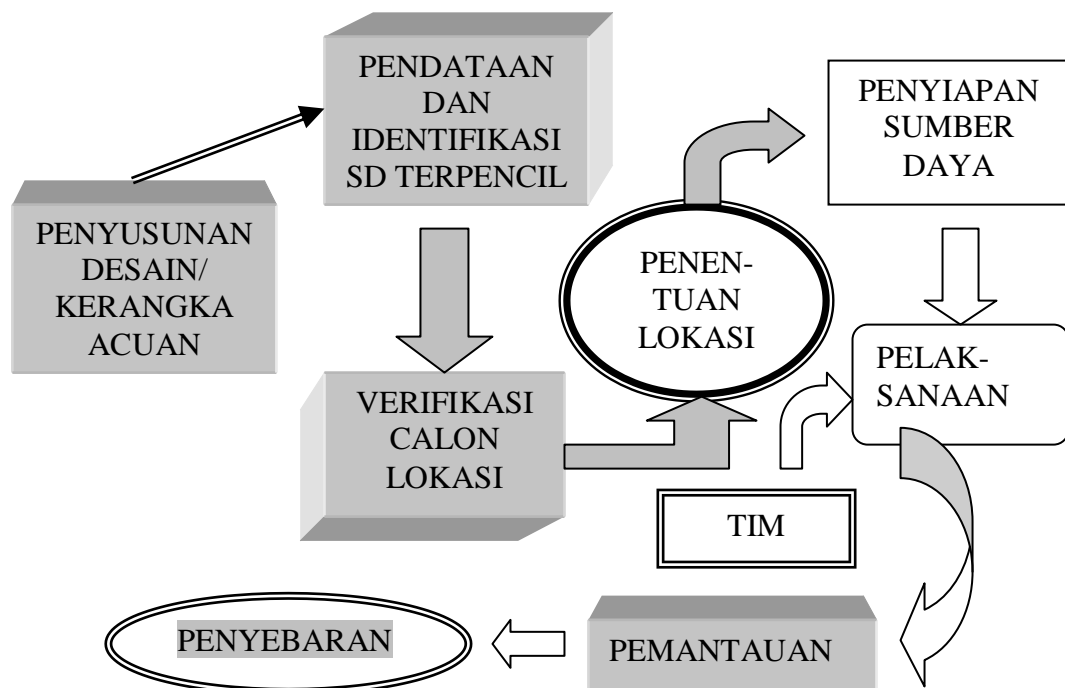
- b. Lebih dari satu SD, tetapi jumlah tamatan tetap terbatas, dapat dibuka satu SMP yang bisa menampung lulusan SD-SD tersebut pada lokasi sebuah SD yang paling layak dilihat dari sudut pandang jumlah siswa dan akses ke lokasi.



(9) Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi sebagai rintisan pengelolaan pendidikan dasar terpadu melibatkan berbagai unit terkait baik di pusat maupun daerah. Lokasi perintisan minimal tiap provinsi ada satu lokasi bahkan mungkin tiap kabupaten yang memiliki daerah terpencil.

Skema alur kegiatan utama adalah sebagai berikut:



(10) Pelaksanaan Perintisan

a. Persiapan (tahun pertama)

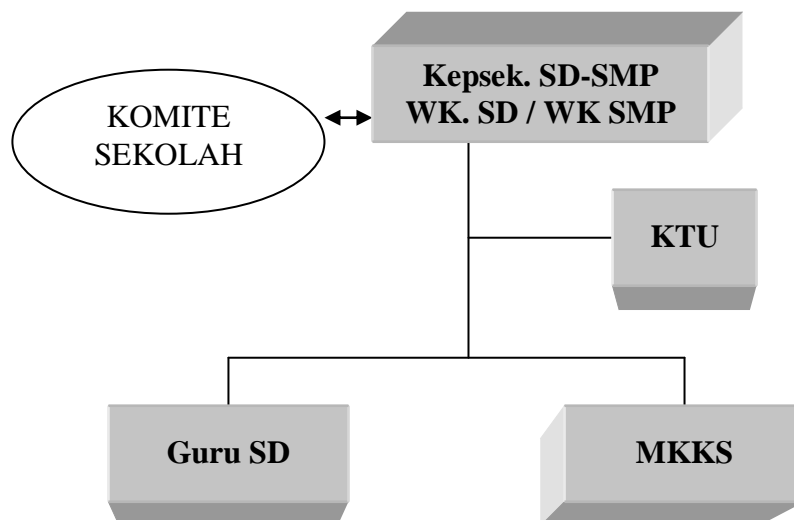
Oleh Pusat (subsidi atau melalui Dekon)		Oleh Daerah / Pemda	
1.	Penyediaan dana untuk pembangunan RKB/RPL, pengadaan buku, dan alat pelajaran	1.	Menginventarisasi kebutuhan ruang, tenaga dan kebutuhan sarana yang lain.
2.	Membantu pengadaan tenaga kependidikan, khususnya guru bantu	2.	Mendata tenaga terdidik dari lingkungan sekitar yang bisa dimanfaatkan
3.	Membantu tenaga pengelola (orientasi)	3.	Merekrut dan mengangkat tenaga, dan menyelenggarakan pelatihan
4.	Melakukan rapat kordinasi dan kolsultasi dengan Pemda	4.	Mengikuti rapat kordinasi dan konsultasi
5.	Menyiapkan dana operasional tahun pertama	5.	Menyiapkan dana operasional tahun kedua dst.
6.	Membantu penyelesaian kelembagaan SMP	6.	Menyelesaikan kelembagaan SMP

b. Pelaksanaan (tahun kedua dan selanjutnya)

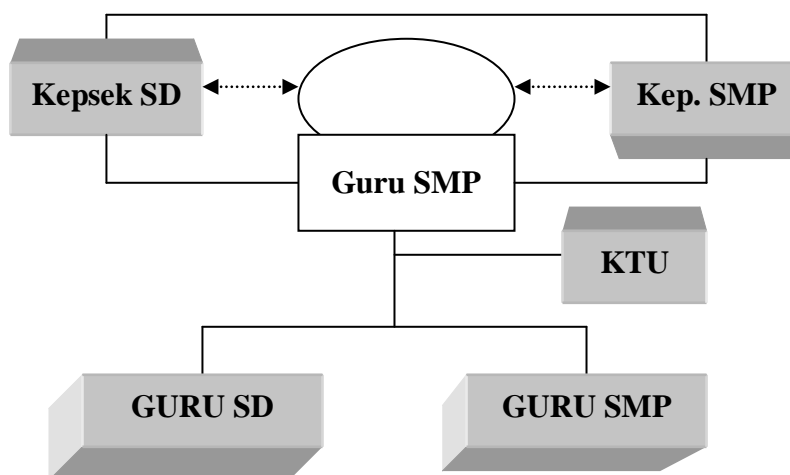
Pusat atau melalui Dekon		Pemda	
1.	Membantu melengkapi sarana penunjang yang belum diselesaikan tahun pertama	1.	Menyediakan anggaran melalui APBD
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi	2.	Melakukan monitoring dan evaluasi
3.	Melakukan pendataan dan pemetaan SD untuk pengembangan tahun berikutnya	3.	Membantu pelaksanaan pendataan dan pemetaan SD untuk pengembangan selanjutnya
4.	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi	4.	Melakukan pembinaan dan supervisi ke sekolah
5.	Meningkatkan kemampuan tenaga pembina/calon pelatih (TOT)	5.	Meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan di SD-SMP Satu Atap

(11) Beberapa alternatif struktur organisasi SD-SMP Satu Atap

a. SD-SMP Satu Atap dengan satu pengelola



b. SD-SMP Satu Atap dengan dua pengelola



B. Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu

Tahap kegiatan perluasan pengembangan mirip pada saat perintisan, yaitu antara lain:

1. Penentuan lokasi
2. Penyempurnaan instrumen verifikasi calon SD-SMP Satu Atap
3. Coachig petugas verifikasi
4. Pelaksanaan verifikasi

5. Analisis data verifikasi
6. Penetapan lokasi
7. Penyiapan lokasi
8. Penyediaan sarana, tenaga, dan prasarana
9. Pelatihan tenaga calon pengelola
10. SD-SMP Satu Atap beroperasi

Sasaran pengembangan SD-SMP Satu Atap sampai dengan tahun 2009 adalah 3.500 lokasi, dengan rincian:

No.	Kegiatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Verifikasi lokasi	750	1000	1500	1000	750	
2.	Penentuan lokasi	500	750	1000	750	500	
3.	Penyediaan sarana		500	750	1000	750	500
4.	Penyediaan prasarana		500	750	1000	750	500
5.	Penyediaan tenaga		500	750	1000	750	500
6.	Orientasi pengelola		500	750	1000	750	500
7.	Pelaksanaan		500	1250	2250	3000	3500
8.	Monitoring dan evaluasi		500	750	1000	750	500
9.	Pembinaan selanjutnya			500	750	1000	750

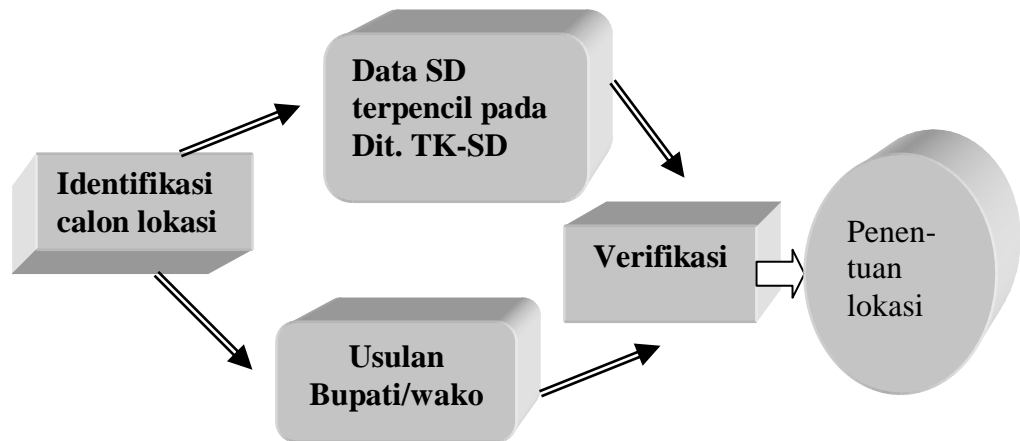
V. PENENTUAN LOKASI PERINTISAN SD-SMP SATU ATAP

A. Pengusulan Lokasi Perintisan Pendidikan Dasar Terpadu

Pada tahap awal, sasaran verifikasi lokasi perintisan dapat diidentifikasi dengan dua cara, yaitu:

1. Verifikasi dilakukan berdasarkan data yang dimiliki pusat, yaitu lokasi SD daerah terpencil yang dimiliki Direktorat TK/SD. Verifikasi dilakukan oleh tim dari pusat dan daerah.
2. Verifikasi didasarkan atas usulan dari bupati/walikota dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Permintaan usulan dari pusat ditujukan kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Pengajuan usulan dari kabupaten/kota. Usulan yang disampaikan oleh kab./kota secara keseluruhan (se-Indonesia) diharapkan minimal berjumlah 750 lokasi.



B. Persyaratan Lokasi SD-SMP Satu Atap

(1) Kriteria umum

- a. SD terletak di daerah terpencil, terisolasi, dan relatif sulit dijangkau.
- b. Lulusan SD di daerah tersebut sebagian besar tidak melanjutkan (minimal 60% tidak melanjutkan, dan secara nominal maksimal 40 anak).
- c. Belum ada SMP baik negeri maupun swasta atau yang sederajat yang dapat terjangkau.
- d. SD terdekat tidak ada atau ada tetapi jumlah lulusan secara keseluruhan sedikit.
- e. SDM yang berkualifikasi sebagai tenaga kependidikan tingkat SMP pada daerah di mana SD berlokasi sangat terbatas.

(2) Kriteria khusus

- a. Pada lokasi SD tersebut tersedia bangunan dan atau lahan yang memungkinkan untuk dikembangkannya prasarana tambahan.
- b. Sambil menunggu tenaga yang diusahakan pemerintah kab./kota, ada kesanggupan tenaga guru atau tenaga terdidik di sekitarnya untuk mengatasi sementara kebutuhan tenaga yang diperlukan.

- c. Ada kesanggupan dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan menyediakan anggaran biaya operasional SMP yang bersangkutan mulai tahun kedua (pada tahun pertama disediakan oleh pusat melalui dana pembangunan).
- d. Urutan bobot penentuan SD mana yang menjadi urutan prioritas, bobot tertinggi adalah: 1) calon siswa, 2) lokasi, yaitu tingkat keterpencilannya, dan 3) kesanggupan Pemda untuk menunjang biaya operasional selanjutnya.

C. Dokumen Pendukung untuk Usulan dari Kabupaten/Kota

Setiap usulan lokasi dari kabupaten/kota harus dilampirkan data dan peta awal dengan menggunakan format terlampir. Tiap 1 (satu) lokasi yang diusulkan dilampiri satu set data dan peta.

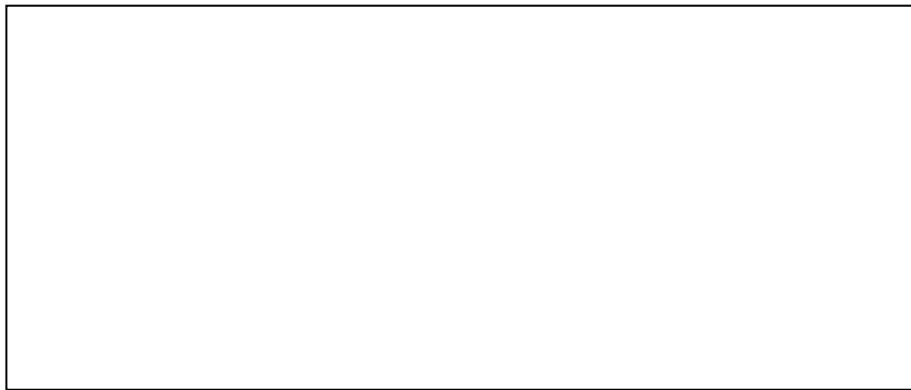
Lampiran:

A. Data Calon Lokasi SD-SMP Satu Atap

1. Propinsi :
2. Kabupaten/Kota :
3. Kecamatan :
4. Nomor urut lokasi :
5. Nama SD yang dicalonkan :
6. Alamat SD :
7. Nama Kepala Sekolah :
8. Data Pendukung :

No.	Jenis data yang diminta	Data	Keterangan
1.	Jumlah Siswa a. Kelas I b. Kelas II c. Kelas III d. Kelas IV e. Kelas V f. Kelas VI		
2.	Jumlah lulusan rata-rata pertahun		
3.	Jumlah Guru a. Berijazah SLTA b. Berijazah PGSD/D2 c. Berijazah D3 ke atas		
4.	Jumlah rombongan belajar		
5.	Jumlah lokal/ruang belajar		
6.	Jumlah tenaga terdidik di sekitar lokasi berijazah SLTA ke atas orang	
7.	Jarak SMP terdekat km	
8.	Bangunan di sekitar SD yang bisa dimanfaatkan untuk belajar		
9.	Kesediaan Pemda mengangkat tenaga kependidikan tambahan	YA / TIDAK	
10.	Kesediaan Pemda dalam menyediakan biaya operasional	YA / TIDAK	
11.	Perabot kantor yang dimiliki SD a. Meja kursi b. Papan tulis		
12.	Penerangan listrik	a. Ada b. Tidak ada	
13.	Jumlah penduduk desa usia 7-12 th pada area jangkauan SD orang	

B. Peta Lokasi SD-SMP terdekat dengan format sebagai berikut:



Lokasi
SD/MI



Lokasi SMP



Sarana transportasi